

ABSTRAK

Hak untuk hidup dan hidup sejahtera sebagai warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi karena tujuan hakiki negara adalah menyejahterakan rakyat nya dan salah satu dari warga negara tersebut adalah gelandangan dan pengemis. Untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari diperlukan keterampilan yang mumpuni sehingga dengan itu mampu mencari nafkah dan memperoleh dengan cara yang baik pula. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang kurang memadai, sehingga banyak ditemukan dari mereka memilih hidup dengan cara menggelandang dan mengemis. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis yang kian meningkat mengingat Yogyakarta adalah daerah destinasi wisata dengan wisata budaya dan alam sebagai unggulannya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat persoalan mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dengan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi D.I Yogyakarta sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta yang merupakan pelaksana tugas sosial terhadap upaya penanganan gelandangan dan pengemis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian normatif empiris, yaitu pengumpulan data melalui Perundang-undangan, literatur, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini dilengkapi pula dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

The rights to life and to live prosperous Indonesia as citizens guaranteed by the Constitution because it is an essential objective of the State to prosper its people and is one of the citizens was a vagrant and beggar. To maintain daily life skills needed to be qualified so with they will able to make a living and earn a good way too. With the limited employment and skills are inadequate, so that many of them found choose life by way of vagrancy and begging. In anticipation of the rate of growth of the Tramp and beggar who is considering increasing the area of tourist destinations with cultural and nature. Yogyakarta Special Region Government published Perda No. 1 year 2014 about handling the Homeless and Beggars. It is therefore deemed necessary to raise the question of the implementation of Perda No. 1 Year 2014. This research aims to look at the implementation of handling the bums and beggars by the provincial Government of Yogyakarta with Perda Yogyakarta special region no. 1 year 2014 about handling the Homeless and Beggars. The location of the research units of the Polisi Pamong Praja Province of Yogyakarta as a Regulatory Enforcement and Dinas Sosial region of the province of Yogyakarta who is acting against the efforts of social handling of homeless and beggars. The type of the data being used is the primary and secondary data. The technique of data collection is done with the normative empirical research, namely data collection through legislation, literature, documents and so on. This research comes in the form of field data with the results of the interviews with Satuan Polisi Pamong Praja, and Dinas Sosial of the Special Region of Yogyakarta.